

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah melakukan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional. Sejak diberlakukannya otonomi daerah sejak tanggal 1 Januari 2001, setiap daerah dipacu untuk mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Menurut Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber penerimaan daerah terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah terdiri Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Dana Lain – Lain Pendapatan (Mardiasmo, 2018)

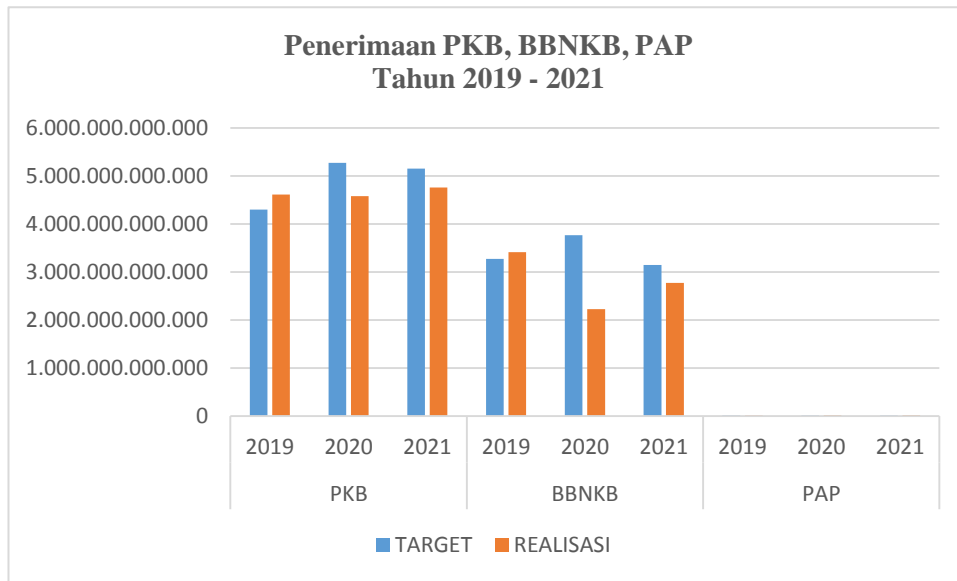
Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari pendapatan berupa pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan

kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan asli daerah berperan sangat penting untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Salah satu kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yaitu kewenangan atas pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber pendanaan di daerah diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kewenangan ini diberikan untuk memperkuat esensi dan posisi otonomi dalam menopang kapasitas fiskal daerah.

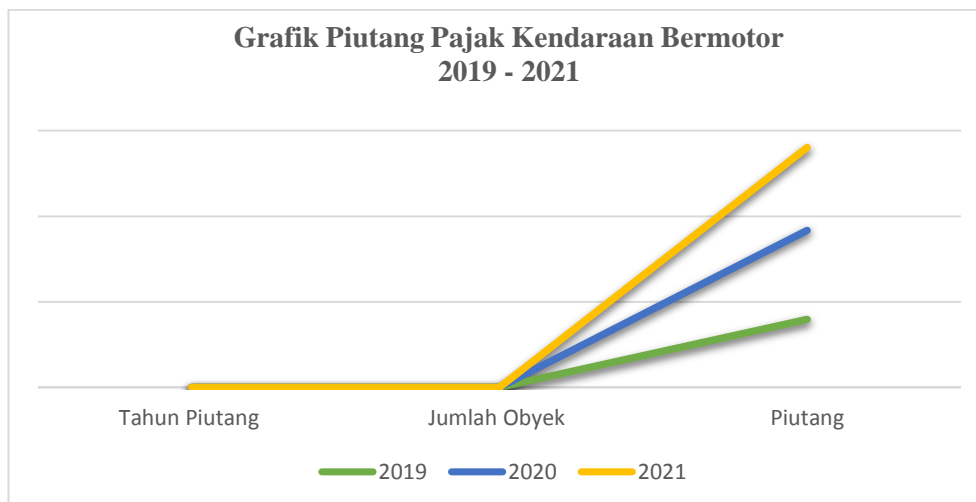
Pemerintah menentukan target realisasi sebagai acuan untuk pencapaian peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mewujudkan Undang – Undang Nomor. 28 Tahun 2009. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat menentukan dalam penerimaan pendapatan daerah, karena semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka daerah tersebut akan menjadi mandiri dan mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat. Jika suatu daerah penerimaan melebihi target yang telah ditetapkan maka akan berdampak positif bagi penerimaan pendapatan daerah. Sedangkan jika acuan target realisasi penerimaan yang telah ditentukan tidak tercapai maka perlu dievaluasi agar target realisasi yang telah ditetapkan bisa tercapai atau melebihi target tersebut (Budi, dkk,2016).

Keadaan 2 (dua) tahun terakhir di dunia muncul adanya wabah virus covid – 19 berasal dari kota Wuhan, China secara cepat menyebar ke seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan, hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kementerian Keuangan yaitu realisasi pendapatan negara pada APBN 2020 sebesar Rp 1.647,7 triliun atau 96,9% dari anggaran pendapatan pada APBN tahun 2020. Pendapatan ini turun Rp 312,8 triliun atau 15,9% dibanding kondisi sebelum covid yaitu anggaran tahun 2019. Realisasi pendapatan negara tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 1.285,1 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 343,8 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp 18,8 triliun (Kemntrian Kominfo, 2020)

Pemerintah daerah juga mengalami penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana target yang sudah ditetapkan tidak tercapai. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari wawancara bersama Kepala Sub Bidang Bagian Pelaporan dan Keberatan Pajak, pada saat pandemi Covid – 19 mulai dari tahun 2020 sampai dengan 2021 penerimaan pajak daerah provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan penerimaan khususnya pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Hal ini disebabkan adanya penurunan pendapatan ekonomi masyarakat sehingga masyarakat lebih mengutamakan untuk biaya hidup sehari – hari daripada untuk membayar biaya pajak (Widasena, 2022).



Gambar 1 1 Grafik Penerimaan PKB. BBNKB, PAP



Gambar 1 2 Grafik Piutang PKB

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan dikarenakan tingginya piutang / tunggakan yang belum dibayarkan oleh wajib pajak, yaitu sebesar Rp 1.402.026.485.694 atau 0,069% dengan total objek pajak sebanyak 3.270.462 dari 37 UPPD di seluruh Jawa Tengah. Tingginya piutang yang ada di provinsi Jawa Tengah disebabkan kurang optimalnya inovasi UPPD untuk melakukan kegiatan dor to dor di setiap daerah.

Maka hal tersebut sangat mempengaruhi tingkat penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tingginya piutang pajak kendaraan bermotor dikarenakan kurangnya antusias masyarakat atau wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya (Heny Herlina,2022).

Selain adanya piutang Pajak Kendaraan Bermotor dalam 3 tahun mengalami kenaikan, pada pajak air permukaan juga mengalami penurunan pendapatan karena mengalami pengurangan salah satu penyebabnya yaitu berkurangnya debit air permukaan sehingga penggunaan air menjadi berkurang, serta adanya piutang wajib pajak (perusahaan) dan daerah yang belum membayar kewajibannya. Dari ketiga variabel yang ada pada penelitian ini yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan, yang mengalami penurunan signifikan adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2020 sebesar 59,1%.

Fenomena pentingnya Pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah memiliki beberapa faktor menjadi indikator yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. Faktor pertama yaitu Pajak Kendaraan Bermotor yaitu pajak yang harus dibayar oleh setiap pemilik kendaraan bermotor yang mengoperasikan kendaraannya di jalan umum. Keberadaan Pajak Kendaraan Bermotor menjadi faktor utama dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ferdiansyah (2020), menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Begitu juga penelitian Savitri & Anggraeni (2021) menunjukkan bahwa

penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Nugrahawati (2019) menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Salah satu penyebab Pajak Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh yaitu adanya wajib pajak yang kurang sadar dalam hal membayar pajak kendaraannya. Hal ini dikarenakan pada saat adanya pandemic Covid – 19 masyarakat lebih mementingkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Widasena, 2022).

Faktor kedua digunakan untuk memprediksi pengaruh Pendapatan Asli Daerah yaitu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Menurut UU No. 28 Tahun 2009. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saputra & Putri (2019), menunjukkan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri & Zahra (2020), menunjukkan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh A A Nurfahmi (2018), menunjukkan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dikarenakan sebagian besar pemilik kendaraan bermotor yang telah melakukan transaksi jual beli kendaraan bekas tidak mengganti bea balik nama kendaraan bermotor (Bapenda, 2022).

Faktor ketiga yaitu Pajak Air Permukaan yaitu pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air permukaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Delima (2022), menyatakan bahwa Pajak Air Permukaan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Widya (2020) menunjukkan bahwa Pajak Air Permukaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dikarenakan kurang sadarnya wajib pajak orang pribadi / badan yang mengetahui jatuh tempo pelaksanaan penagihan pajak air permukaan, serta masih banyaknya yang belum memiliki izin pemakaian pajak air permukaan (Lilik, 2022).

Dari fenomena diatas, masih terdapat banyak perbedaan pendapat antara penelitian satu dengan penelitian lainnya mengenai pengaruh pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan terhadap pendapatan asli daerah serta peran pajak daerah dalam memenuhi target penerimaan realisasi pendapatan daerah. Kondisi saat ini Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang memiliki jumlah penerimaan terbesar mengalami penurunan sedangkan Pajak Air Permukaan yang memiliki jumlah penerimaan terkecil tetapi selalu mengalami peningkatan, maka penelitian ini penting untuk dilakukan dengan harapan dapat memberikan gambaran mengenai seberapa besar pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di provinsi Jawa Tengah. Sehingga penelitian ini mengambil judul “ **ANALISIS PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB),**

PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI JAWA TENGAH 2019 – 2021.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Apakah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah?
- b. Apakah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah?
- c. Apakah Pajak Air Permukaan (PAP) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah?
- d. Apakah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP) secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah?

Batasan masalah pada penelitian ini adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan yang terdapat di 37 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu :

- a. Untuk membuktikan secara empiris bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah.
- b. Untuk membuktikan secara empiris Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah
- c. Untuk membuktikan secara empiris Pajak Air Permukaan (PAP) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah secara parsial.
- d. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP), terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah secara simultan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti empiris mengenai pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan teori institusional. Untuk teori institusional menjelaskan terkait dengan aturan atau kebijakan yang dibuat oleh suatu instansi yang disesuaikan dengan ekspektasi masyarakat, sehingga aturan atau kebijakan tersebut dapat diterima dan dipatuhi..

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pajak daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah dan pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Bagi Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Tengah

Dapat memberikan solusi atas permasalahan serta dalam pengembalian kebijakan – kebijakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

3. Bagi Pembaca

Dapat dijadikan sebagai referensi serta sumber informasi penelitian terbaru terkait dengan permasalahan yang sama.

1.5. Sistematika Penelitian

Sistematika dalam penulisan skripsi ini disajikan untuk memberikan gambaran secara keseluruhan terkait isi dari Bab I sampai dengan Bab V. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam BAB ini akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Berisikan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, dan hipotesis.

Bab III : Metodologi Penelitian

BAB ini akan menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional. Penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Dalam BAB ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis, dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V : Penutup

Sebagai BAB terakhir dari penelitian ini akan diuraikan simpulan